



**Strategi Propaganda dan Ideologi PKI 1914-1948: Dari ISDV  
Hingga Pemberontakan Madiun**

Via Dwi Efendi<sup>1</sup>, Ali Wahab Nugraha<sup>2</sup>, Uzlifatu Syifa<sup>3</sup>, Ahmad Maftuh  
Sujana<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten<sup>1234</sup>

Email: viadwiefendi27@gmail.com<sup>1</sup>, aliwahabnug@gmail.com<sup>2</sup>,  
uzlifatusyifa@gmail.com<sup>3</sup>, maftuhsujana@gmail.com<sup>4</sup>

*Abstract*

*This research examines the propaganda dynamics of the Indonesian Communist Party (PKI) from 1914 to 1948, which began with the founding of the Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) by Sneevliet in Semarang. The transformation of the ISDV into the PKI in 1920 marked a new chapter in the struggle for the ideology of communism in Indonesia. The PKI employed various propaganda strategies, including infiltrating national organizations, utilizing print media, mobilizing workers and peasants, and organizing strikes and demonstrations, to expand its influence. The role of print media, such as Het Vrije Woord and Sinar Hindia, was crucial in disseminating the ideology of Marxism-Leninism. Additionally, the PKI leveraged popular discontent with colonial policies to establish a robust mass base. The next PKI movement was the 1926-1927 rebellion, which demonstrated the party's ability to mobilize the masses against the colonial system. After Indonesian independence, the PKI was active in the Madiun region in 1948. This research provides insight into how the PKI's propaganda strategy adapted to local conditions and contributed to the development of political movements in Indonesia.*

**Keywords:** *Propaganda, Strategy, PKI, Political Movement, Ideology*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika propaganda Partai Komunis Indonesia (PKI) dari tahun 1914 hingga 1948, yang diawali dengan berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) oleh Sneevliet di Semarang. Transformasi ISDV menjadi PKI pada tahun 1920 menandai babak baru dalam perjuangan ideologi komunisme di Indonesia. PKI menggunakan berbagai strategi propaganda, termasuk menyusup ke organisasi-organisasi nasional, memanfaatkan media cetak, memobilisasi pekerja dan petani, serta mengorganisasi pemogokan dan demonstrasi, untuk memperluas pengaruhnya. Peran media cetak, seperti Het Vrije Woord dan Sinar Hindia, sangat penting dalam menyebarluaskan ideologi Marxisme-Leninisme. Selain itu, PKI memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan kolonial untuk membangun basis massa yang kuat. Gerakan PKI berikutnya adalah pemberontakan 1926-1927, yang menunjukkan kemampuan partai untuk memobilisasi massa melawan sistem kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, PKI aktif di wilayah Madiun pada tahun 1948. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana strategi propaganda dan ideologi PKI beradaptasi dengan kondisi setempat dan berkontribusi terhadap perkembangan gerakan politik di Indonesia.

**Kata kunci:** Propaganda, Strategi, PKI, Gerakan Politik, Ideologi



## **PENDAHULUAN**

Masuknya paham komunis ke Indonesia tidak terlepas dari peran kaum sosialis dari Belanda. Pada awal abad ke-20, Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan Belanda menjadi sasaran ideologi Marxisme. Benih-benih Marxisme telah ditanam di Indonesia sebelum Perang Dunia I dengan kedatangan H.J.F.M. Sneevliet, seorang pemimpin buruh asal Belanda. Sneevliet adalah anggota *Sociaal Democratische Arbeiderspartij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda. Di Indonesia, ia pertama kali bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar *Soerabajasch Handelsblad*. Namun, pada tahun 1913, ia pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris *Semarangse Handelsvereniging*.

Semarang merupakan pilihan strategis bagi Sneevliet karena merupakan pusat dari *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP), serikat pekerja kereta api tertua yang terorganisir dengan baik di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin sosialis yang berpengalaman, Sneevliet dengan cepat membawa VSTP ke arah yang lebih radikal. Atas inisiatifnya, pada tanggal 9 Mei 1914, ia bersama dengan pemimpin sosialis lainnya seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan Bergsma, mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV), sebuah organisasi Marxis pertama di Asia Tenggara yang berpusat di Semarang (Vriendenkring, 1986). Pada tahun 1915, ISDV mulai menerbitkan majalah *Het Vrije Woord*, dengan editor yang dipimpin oleh Sneevliet, Bergsma, dan Adolf Baars.

Setelah Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, ISDV mulai mengalami radikalisasi ideologi. Pada tanggal 5 Maret 1919, Kongres Komintern Pertama di Moskow diikuti oleh kongres kedua di Petrograd pada Juli-Agustus 1920. Pada kongres ini, Sneevliet mengusulkan pentingnya mendapatkan dukungan massa untuk perjuangan komunis. Kongres ini kemudian menyepakati kerja sama antara kaum komunis di berbagai negara untuk pembebasan Asia, yang semakin memperkuat pengaruh komunisme di Indonesia (Hatama dkk., 2022).



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi propaganda yang digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam membangun pengaruh politik dan sosial di Indonesia pada periode 1914-1948. Sejak berdirinya *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet, ideologi komunisme mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

ISDV kemudian bertransformasi menjadi PKI pada tahun 1920, menjadikannya sebagai partai komunis pertama di Asia. Dalam perkembangannya, PKI menggunakan berbagai strategi propaganda untuk memperluas pengaruhnya, baik melalui media cetak, jaringan organisasi buruh dan tani, maupun pendekatan dengan organisasi pergerakan nasional lainnya.

Secara politik, PKI berusaha menyebarkan ideologinya dengan membangun aliansi strategis dengan organisasi-organisasi lain dan menyusup ke berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, dari sisi sosial, PKI menggunakan propaganda untuk menarik dukungan dari kalangan buruh, petani, dan intelektual sebagai basis massanya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk melihat bagaimana propaganda PKI berkontribusi pada peristiwa-peristiwa politik penting, termasuk pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927 dan upaya PKI untuk membangun kembali kekuatannya setelah pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia.

Dengan mengkaji perubahan strategi propaganda PKI dari waktu ke waktu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ideologi dan metode perjuangan politik PKI berkembang serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan di Indonesia selama periode 1914-1948. Melalui pendekatan historis, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kritis mengenai pola gerakan politik di Indonesia dan relevansinya dalam memahami perkembangan politik di masa depan (Runalan & Ginanjar, 2014).



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu pendekatan ilmiah untuk menelusuri, menganalisis, dan menafsirkan peristiwa masa lampau secara kritis dan sistematis guna merekonstruksi fakta sejarah secara objektif. Proses penelitian dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) heuristik, pengumpulan sumber melalui studi kepustakaan berupa dokumen, arsip, surat kabar, dan literatur ilmiah, (2) kritik sumber, verifikasi keaslian dan keabsahan data melalui kritik ekstern dan intern, (3) interpretasi, penafsiran terhadap fakta untuk menemukan hubungan sebab-akibat, (4) historiografi, penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang logis dan kronologis. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan juga sekunder. Sumber primer berasal dari data sezaman seperti surat kabar Soeara Ra'jat dan De Waarheid. Sedangkan untuk sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik kajian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Transformasi ISDV Menjadi PKI (1920)**

Setelah pengusiran Henk Sneevliet dan beberapa tokoh radikal lainnya dari Hindia Belanda, kepemimpinan *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) secara perlahan berpindah ke tangan kader-kader bumiputra yang pernah dibina oleh Sneevliet dan rekan-rekannya. Dua tokoh penting dalam gerakan ini adalah Semaun dan Darsono, yang sebelumnya aktif di Sarekat Islam (SI) dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi Marxis. Semaun, yang telah menjadi pemimpin SI cabang Semarang sejak 1917, bersama dengan Darsono, memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran komunisme kepada masyarakat pribumi melalui strategi keanggotaan ganda di SI.



Melalui taktik ini, pengaruh ISDV semakin mengakar di kalangan buruh dan petani, yang kemudian menjadi basis utama gerakan komunis di Hindia Belanda.

Perkembangan ISDV di Hindia Belanda juga tidak terlepas dari dinamika politik internasional. Keberhasilan Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 menjadi inspirasi besar bagi gerakan-gerakan Marxis di seluruh dunia, termasuk di Hindia Belanda. Revolusi ini berujung pada seruan Lenin untuk mendirikan partai-partai komunis di setiap negara sebagai bagian dari strategi revolusi dunia. Sejalan dengan itu, pada tahun 1918, *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP) di Belanda secara resmi bertransformasi menjadi Partai Komunis Belanda. Perubahan ini mendorong beberapa anggota ISDV di Hindia Belanda untuk mengikutinya, mengingat ISDV memiliki keterkaitan erat dengan gerakan sosialis di Belanda.

Momentum perubahan ini semakin kuat pada tahun 1920. Pada Kongres ISDV VII yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 1920 di kantor Sarekat Islam di Semarang, Adolf Baars mengusulkan agar ISDV diubah menjadi organisasi yang berorientasi komunis secara terbuka. Usulan ini mendapat dukungan luas dari para anggota yang melihat perlunya langkah yang lebih tegas dalam perjuangan revolusioner. Akhirnya, kongres memutuskan untuk mengubah ISDV menjadi Perhimpunan Komunis Hindia Belanda, yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) (Vriendenkring, 1986).

Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah gerakan komunis di Indonesia. Jika sebelumnya ISDV lebih berfokus pada penyebaran ideologinya secara perlahan melalui infiltrasi ke dalam organisasi-organisasi lain, maka dengan menjadi PKI, gerakan ini mulai membangun kekuatannya secara lebih terbuka. Semaun ditunjuk sebagai ketua pertama PKI, menjadikannya pemimpin pribumi pertama dalam sejarah organisasi komunis di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi semakin aktif dalam mengorganisir buruh dan petani, serta berusaha memperkuat posisinya di kancah politik Hindia Belanda (Republik Indonesia, 1994).



Pada tahap awal perjuangannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengadopsi strategi agitasi dan propaganda untuk menarik dukungan dari kelas pekerja dan petani, terutama melalui serikat pekerja dan organisasi sosial. Salah satu metode utama yang digunakan adalah infiltrasi ke dalam Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi yang memiliki basis massa yang luas di kalangan pedagang dan pekerja. Strategi ini dilakukan dengan memasukkan anggota ISDV (cikal bakal PKI) ke dalam Sarekat Islam, yang kemudian menghasilkan faksi radikal yang dikenal sebagai Sarekat Islam Merah. Faksi ini lebih berorientasi pada perjuangan kelas dan mengadopsi ideologi Marxis dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan petani (Darsono & Dengah, 1920).

Selain Sarekat Islam Merah, PKI juga berusaha memobilisasi kelas buruh dengan membangun dan mengendalikan berbagai serikat buruh dan organisasi tani. Salah satu organisasi buruh yang paling awal dipengaruhi oleh PKI adalah *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP), serikat buruh kereta api yang berbasis di Semarang. PKI menggunakan VSTP sebagai alat agitasi untuk menyebarkan kesadaran kelas di kalangan buruh, mengorganisir pemogokan, dan menuntut kondisi kerja yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Melalui propaganda dan aksi langsung, PKI berusaha membangun solidaritas antara buruh dan petani, karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu masih bergantung pada sektor agraria (Darsono & Dengah, 1920).

Sektor pertanian pada strategi agitasi PKI adalah dengan menyusup ke dalam organisasi-organisasi petani dan membentuk kelompok-kelompok petani yang lebih radikal. Keputusan konferensi Kota Gede pada bulan Desember 1923 menegaskan bahwa Serikat Rakyat, sebuah organisasi yang telah berkembang dari Sarekat Islam Merah, akan digunakan sebagai alat utama untuk mengorganisir kaum tani. PKI menyadari bahwa tanpa dukungan kaum tani, perjuangan revolusioner mereka akan sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, kader-kader PKI dikirim ke desa-desa untuk menggalang massa, membangun jaringan organisasi, dan mengadakan diskusi dan pelatihan bagi petani tentang hak-hak atas tanah dan ketidakadilan sistem kolonial (Brackman, 1963).

## **2. Strategi Propaganda dan Mobilisasi Massa dalam Gerakan Awal PKI**

PKI menggunakan media cetak sebagai alat utama dalam menyebarkan ideologi Marxisme-Leninisme kepada masyarakat luas. Sejak awal pergerakannya, ISDV (cikal bakal PKI) telah menggunakan surat kabar dan pamflet sebagai alat propaganda untuk menarik simpati kaum buruh dan petani. Salah satu media cetak yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran komunisme adalah *Het Vrije Woord* (Suara Kebebasan) yang mulai terbit pada tahun 1915. Surat kabar ini menjadi corong utama propaganda ISDV dalam menyebarkan ide-ide sosialisme dan mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, ISDV juga menerbitkan *Soeara Mardika* dan kemudian *Soeara Rakjat*, yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pembaca pribumi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami (Masril, 2020).

Pada periode setelah ISDV bertransformasi menjadi PKI, penggunaan media cetak diintensifkan untuk memperluas pengaruh partai. Salah satu surat kabar utama yang menjadi alat propaganda PKI adalah *Sinar Hindia*, yang dikelola oleh Semaun dan Darsono. Melalui surat kabar ini, PKI menyebarkan wacana perjuangan kelas, menyerukan persatuan buruh dan tani, serta mengkritik sistem kolonial yang dianggap menindas rakyat kecil (Sufyan, 2018). Selain itu, PKI juga menerbitkan pamflet-pamflet yang menyerukan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme. Pamflet-pamflet tersebut sering disebar di pabrik-pabrik, perkebunan, dan daerah pedesaan untuk menarik simpati para buruh dan petani (Ansori, 2025).

Strategi PKI dalam menggunakan media cetak tidak hanya sebatas penyebaran ide, tetapi juga sebagai alat agitasi yang bertujuan untuk mendorong aksi-aksi revolusioner. Melalui berbagai terbitannya, PKI mengajak rakyat untuk mogok kerja, menuntut hak-hak ekonomi dan sosial, serta menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap merugikan kaum proletar. Bahkan, dalam beberapa edisi surat kabar dan pamfletnya, PKI secara terang-terangan menyerukan revolusi dan pembentukan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip komunisme (Pusjarah TNI, 2009).



PKI menggunakan pemogokan dan demonstrasi sebagai strategi utama dalam memobilisasi buruh dan petani untuk menekan pemerintah kolonial dan memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu aksi besar adalah pemogokan buruh di Delanggu pada tanggal 19-23 Juni 1948, yang berlangsung di kawasan industri pabrik rami dan ladang kapas milik pemerintah. Aksi ini merupakan bagian dari strategi politik PKI yang dikenal sebagai “senjata pemogokan”, di mana mereka menggunakan pemogokan sebagai alat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kaum proletar (Muryanti, 2020).

Selain pemogokan buruh, PKI juga mendorong para petani untuk melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi agraria dan penghapusan sistem feodal. Demonstrasi-demonstrasi ini seringkali dilakukan secara massal, melibatkan ribuan petani yang menuntut redistribusi tanah dan menentang kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap tidak adil. Gerakan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, di mana kader-kader PKI secara aktif mengorganisir kelompok-kelompok tani untuk melawan tuan tanah dan pejabat kolonial (Novita, 2015).

### **3. Pemberontakan PKI 1926-1927**

Kebijakan ekonomi kolonial Hindia-Belanda pada saat itu menekan masyarakat pribumi, seperti adanya kenaikan pajak yang dilakukan oleh Gubernur Fock pada tahun 1921. Akibat dari kebijakannya terjadi sebuah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan pemotongan upah secara sepihak oleh suatu perusahaan. Pada saat itu kebijakan pemerintah kolonial ini menjadi pemicu terbentuknya rasa solidaritas dalam masyarakat Indonesia yang kemudian berubah menjadi Gerakan sebuah aksi perlawanan untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial hingga tahun 1927. Ketidakstabilan sebuah perekonomian ini yang dimanfaatkan oleh golongan komunis untuk melancarkan dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok seperti, serikat-serikat buruh, petani, dan pegawai negeri sipil (McVey, 1965).



Pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil berkembang pesat dan menjadi organisasi yang sangat kuat dan dianggap mengancam eksistensi pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Meskipun pemerintah kolonial terus melakukan upaya pengawasan secara ketat, hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan PKI pada saat itu. Perkembangan inilah yang akhirnya mengarah pada rencana pemberontakan besar-besaran yang menyebar ke daerah-daerah di Indonesia (Batubara, 2022).

Dalam upaya memobilisasi massa, PKI menerapkan berbagai strategi propaganda untuk memperkuat basis dukungan dan mempersiapkan aksi pemberontakan. Tokoh-tokoh komunis secara aktif mendukung dan memelopori gerakan yang dilakukan oleh organisasi serikat-serikat buruh, petani, dan pegawai sipil. PKI secara langsung telah mengorganisir aksi-aksi pemogokan serentak dan penentangan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Hindia-Belanda dengan tujuan menuntut kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa bentuk propaganda yang dilakukan oleh PKI di beberapa wilayah Indonesia seperti Banten. Awal mula kemunculan PKI di Banten, yang diperankan oleh R. Oesadiningrat. Ia adalah seorang karyawan Stasiun Kreta Api Tanah Abang yang dipecat oleh otoritas kolonial yang kemudian aktif di Sarekat Buruh Api sebagai pengurus harian penuh. Pada saat itu R. Oesadiningrat membuat rapat besarnya di daerah Pandeglang untuk membuat sebuah organisasi yang bernama Sarekat Rakyat. Pertemuan rapat ini dihadiri oleh Alimin dan Muso, pada saat itu sebagai tokoh besar PKI.

Kesempatan saat itu mereka gunakan untuk menjelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan Belanda. Hal ini merupakan usaha mereka untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Banten, para propaganda PKI ini telah menghilangkan ideologi komunisme, telah berganti pada saat itu untuk mengedepankan persamaan perjuangan Islam dan PKI. Rata-rata kelompok Muslim yang ada di Banten, tentu saja tidak menentang kehadiran sebuah PKI.



Pajak inilah yang membuat resah petani sehingga suatu saat akan terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Pada suatu Waktu di bulan Juli sampai September 1926, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan sebuah misi penangkapan terhadap beberapa tokoh pimpinan PKI di Banten.

Akibat penangkapan ini, terjadilah pertempuran para jawara banten dan ulama Pandeglang dengan Belanda pada tanggal 6 November 1926 terjadi pemberontakan PKI bersenjata. Pemberontakan PKI di Banten terjadi karena adanya sebuah hubungan antara ulama dan tokoh-tokoh PKI. Pada saat itu adanya persamaan ideologi diantara sosialisme islam dengan sosialisme marxisme. Untuk tujuan utamanya yaitu ingin menghilangkan ideologi kapitalisme. Namun terdapat perbedaan antara sosialisme islam dengan marxisme, yaitu dasar yang digunakan oleh sosialisme islam adalah agama yaitu berkaitan al-qur'an dan sunah. Sedangkan ideologi marxisme lahir dari reaksi antar bangsa Eropa yang menindas dan hanya berdasarkan kesamaan sebagai manusia yang ditindas oleh ideologi kapitalisme.

Pada saat itu perekonomian yang ada di Banten juga ikut anjlok karena kebijakan pihak pemerintah kolonial Belanda, maka dari situlah melemahnya kondisi ekonomi yang menjadi alasan lain masyarakat mau melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, agar terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat memberatkan masyarakat (Asmawati, 2021).

Pemberontakan di wilayah lainnya terdapat di provinsi Jawa Barat dan Sumatra Barat. Kejadian ini terjadi pada bulan November 1926, dimana PKI memimpin pemberontakan untuk melawan pemerintah kolonial dan membuat sebuah republik baru. Akan tetapi pemberontakan ini digagalkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Pada saat itu ribuan orang dibunuh dan rata-rata 13.000 orang ditahan. Ada sebuah kelompok yang berisi 1.308 orang, umumnya berisi kader-kader partai yang dikirim ke Boven Digoel untuk menahannya di tanah Papua.

Beberapa orang meninggal di dalam tahanan dan banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial,



untuk alasan menindas dan memusnahkan para pemberontakan kaum komunis. Dengan adanya pemberontakan PKI ini menjadikannya organisasi PKI telah di cap terlarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Hasanah, 2020).

Pemberontakan ini mengalami puncaknya di pulau Jawa pada tanggal 12 Desember 1926, pada saat itu setelah pertemuan para ketua partai. Pada saat pertemuan para ketua partai tersebut ada sebuah pidato yang berisikan tentang organisasi, terutama tentang memperkuat gerakan serikat buruh, gerakan pemuda, mendirikan sekolah-sekolah, tetapi permasalahan tani dan organisasi tani sedikitpun tidak dibicarakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pidatonya PKI tidak menyinggung atau membicarakan masalah tani maupun organisasi tani.

Pemberontakan yang meletus ini secara objektif merupakan akibat sebuah penindasan dan merebut hak pribumi yang dilakukan oleh kaum imperialis Belanda, kaum-kaum feodalisme dan agen-agen kapitalisnya yang menyebarkan provokasi-provokasi yang telah dilancarkannya. Akan tetapi jalannya pemberontakan ini hanya bertahan selama 1 bulan saja, dikarenakan dalam pemberontakan ini PKI telah gagal memahami beberapa hal. Faktor gagalnya pemberontakan PKI disebabkan beberapa kesalahannya seperti berikut; 1) PKI tidak terlalu mengenal bagaimana masyarakat Indonesia sesungguhnya, 2) PKI kurang mengerti peranan kaum tani, 3) pembangunan partai yang kebanyakan diisi oleh kelas menengah dan tidak dibangunnya sebuah ideologi proletar yang berisi kelas proletarian (pekerja).

Tiga hal tersebut menjadi sebuah kunci utama kegagalan PKI pada pemberontakan 1926. Hal pertama, PKI tidak terlalu mengenal secara sungguh masyarakat Indonesia. Untuk membentuk sebuah masyarakat sosialis di Indonesia sudah seharusnya PKI telah mengetahui watak masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya PKI tidak terlalu mengenal secara penuh watak masyarakat Indonesia. PKI pada saat itu hanya menganggap bahwa masyarakat Indonesia sifatnya sama persis dengan masyarakat Rusia sebelum revolusi.



Hal kedua, PKI kurang mengerti permasalahan kaum tani, karena PKI kurang paham kaum tani maka membuat PKI belum cukup memobilisasi dan mengorganisir kaum tani sebagai perlawanan terhadap sebuah kaum imperialisme. Hal ketiga, pembangunan partai yang kebanyakan diisi kelas menengah dan tidak dibangunnya ideologi proletar, elit-elit partai hanya diisi oleh kelas menengah yang membanggakan sebuah semboyan kekiri-kirian dan tidak ditegakkannya sebuah ideologi proletar (Listyawan dkk., 2024).

Walaupun pemberontakan ini mengalami kegagalan total yang ditindas secara kejam oleh pemerintah kolonial belanda. PKI telah memberikan suatu garis tegas dan arah yang pasti bagi gerakan-gerakan nasional selanjutnya. Akan tetapi dampak tidak serta merta lenyap tanpa bekas. Ada sebuah dampak pasca pemberontakan seperti; pembubaran PKI oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Para pemimpin PKI ditangkap dan sebagian besar diasingkan ke tempat-tempat terpencil seperti Boven Digoel di tanah Papua, yang terkenal dengan kondisi alam yang keras dan sistem pengawasan yang ketat (Hatama dkk., 2022).

Dapat disimpulkan penjelasan diatas kegagalan pemberontakan PKI 1926-1927 telah menyebabkan reorientasi strategi perjuangan dalam pergerakan nasional Indonesia. Banyak aktivis pergerakan yang kemudian lebih memilih pendekatan yang lebih moderat dan kooperatif dalam menghadapi pemerintah kolonial. Penindasan yang keras terhadap gerakan radikal menjadi pelajaran penting yang mempengaruhi arah perjuangan kemerdekaan Indonesia selanjutnya.

#### 4. Pemberontakan Madiun 1948

Tahun 1948 menjadi salah satu tahun terberat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di tengah persiapan menghadapi agresi militer Belanda, Indonesia justru menghadapi ancaman internal berupa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada bulan September 1948, yang dianggap sebagai "tikaman dari belakang." Krisis ini bermula setelah Persetujuan Renville pada 17 Januari 1948, yang memicu ketidakpuasan politik.



Kabinet Amir Syarifuddin dianggap gagal, sehingga Presiden Soekarno membubarkannya dan menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru (McVey, 1958).

Muhammad Hatta mengajak tiga partai besar (Masyumi, PNI, dan Sayap Kiri) untuk membangun kabinet koalisi. Sayap Kiri tidak menolak ini, tetapi harus menerima 10 kursi seperti yang diinginkan, seperti Menteri Pertahanan atau Urusan Luar Negeri. Namun, tawaran itu ditolak oleh Muhammad Hatta, dan pada akhirnya Hatta membentuk kabinet tanpa sayap kiri.

Amir Sjarifuddin adalah tokoh sentral yang terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948, dengan latar belakang pendidikan yang dimulai di ELS Medan (1914–1921) sebelum ia melanjutkan studi di Leiden, Belanda. Ia dibentuk oleh pandangan politik revolusioner, yang menurut Jacques Leclerc, menjadikannya "anak revolusi" yang terinspirasi terutama oleh ajaran tentang Revolusi Prancis, bukan Revolusi Amerika atau Rusia. Setelah mundur dari kursi Perdana Menteri, Amir beralih menjadi oposisi sayap kiri terhadap Kabinet Hatta dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Mengenai Peristiwa Madiun, meskipun ia adalah tokoh PKI, Amir Sjarifuddin tidak berada di Madiun saat pecahnya pemberontakan pada 19 September 1948. Saat itu, ia sedang melakukan safari kampanye 'Jalan Baru' bersama Musso di kota lain di Jawa Timur, dan juga tercatat berada di Yogyakarta untuk kongres Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) (Arrasyid, n.d.).

Kelompok sayap kiri kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah pimpinan Amir Syarifuddin, yang menentang kebijakan pemerintah Hatta, termasuk kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) yang bertujuan memperkuat TNI sebagai alat negara yang efisien dan bebas dari pengaruh politik. Kebijakan ini memotong pengaruh FDR di tubuh militer, terutama dengan pembubaran TNI-Masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh perwira-perwira berhaluan komunis (Susilo, 2017).

Rera adalah kebijakan politik yang ingin mencukur kekuatan militer PKI. Karena sebagian besar anggota Laskar yang dipengaruhi oleh



politik PKI adalah mereka yang terkena kebijakan ReRa. Ini memberi responsif tanpa akhir di kamp PKI dan mencoba mengguncang pemerintah Kabinet Hatta. Hal ini menyebabkan berbagai upaya revolusioner yang kemudian dilakukan oleh PKI untuk mendapatkan kekuasaan dari tangan pemerintah, yang pada kemudian hari FDR menerbitkan dokumen yang berisi rencana pemberontakan.

Pada tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Presiden Hatta diumumkan tanpa melibatkan Sayap Kiri. Kabinet ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 3 Februari 1948. Sementara itu, pada 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta pada saat sidang BP. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) telah menjelaskan pedoman pemerintah untuk mengimplementasikan program ini. Berdasarkan mosi Baharuddin, keberadaan tentara yang efisien dari satu komando adalah alat yang kuat dan kekebalan tubuh dari kekuatan politik di luar militer itu sendiri. RI yang kuat adalah keuntungan dalam menangani tekanan Belanda. Mereka yang terkena dampak rasionalisasi akan dijamin dan didistribusikan oleh Kementerian untuk pembangunan dan pemuda (Mohammad, 1983).

Berikutnya RERA merealisasikan pengeluaran penetapan presiden no. 14 tanggal 4 Mei 1948, dan dikonfirmasi dalam hal implementasi rasionalisasi teknis. Penetapan tersebut mengatakan dua komando telah dibentuk di daerah tersebut. Markas Besar Komando Jawa (MBKD) dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS). Jawa dulu memiliki tujuh divisi yang ramping, tetapi setelah RERA terealisasikan, dibatasi oleh empat divisi. Restrukturisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat bertujuan untuk mengurangi tentara produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi.

Hatta melihat banyak potensi dari beribu-ribu desa di Indonesia yang apabila tiap desa menampung tentara yang dipindahkan akan sangat berguna dan Hatta melihat bahwa di Indonesia terdapat beribu-ribu desa dan jika tiap Desa menampung mereka yang dikembalikan akan sangat berguna dan mudah realisasinya.



Terlebih para pekerja tersebut telah memperoleh pesangon tiga bulan gaji sebelumnya dan diharapkan dapat hidup secara layak setelahnya.

Situasi semakin memanas dengan kembalinya Muso, tokoh komunis Indonesia, dari Moskow pada Agustus 1948. Muso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang sudah terlibat dalam sayap kiri sejak awal abad ke-20. Ia mulai aktif dalam PKI sejak 1920-an dan terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926-1927 yang melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah pemberontakan itu gagal, ia melarikan diri ke Uni Soviet dan menetap disana selama lebih dari dua dekade, belajar ideologi komunis dan strategi revolusi. Di Uni Soviet, Muso mendapatkan pengalaman politik yang lebih dalam. Ia juga berinteraksi dengan Partai Komunis Uni Soviet dan mendapatkan dukungan untuk memperkuat kembali PKI (Poeze, 2011).

Latar belakang sosial di Jawa Timur menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pedesaan adalah petani atau peternak. Setelah kemerdekaan, isu kepemilikan tanah menjadi krusial. Perkembangan ini dimanfaatkan oleh Muso dan PKI, yang melihat potensi besar massa petani dan buruh untuk mendukung partai. Dalam Konferensi PKI Agustus 1948, dirumuskanlah program agraria yang memprioritaskan petani, didasarkan pada keyakinan bahwa revolusi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif mereka.

Namun, peningkatan jumlah penduduk dan masuknya ekonomi pasar ke pedesaan menyebabkan banyak petani kecil kehilangan tanah. Luas tanah yang terbatas membuat perekonomian mereka tidak signifikan, menjebak mereka dalam utang, dan memaksa mereka menjual tanah kepada orang yang lebih mampu. Akibatnya, banyak petani beralih menjadi buruh tani bagi petani besar, memunculkan hubungan sosial berdasarkan kepemilikan tanah. Ide PKI mengenai kesetaraan kelas antara pemilik tanah dan buruh tani pun mendapat dukungan signifikan di Madiun. Situasi ini diperburuk oleh memburuknya kondisi ekonomi pasca Agresi Militer Belanda I yang menduduki kota-kota penting (Ubaidillah, 2023).



Muso membawa ideologi garis keras Kominform dan memperkenalkan platform baru bernama "Jalan Baru untuk Republik Indonesia," yang bertujuan menjadikan PKI sebagai pemimpin revolusi nasional. Di bawah kepemimpinannya, PKI mengambil alih FDR dan mengubahnya menjadi organisasi komunis klasik. Anggota PKI pun meningkat drastis dari 3.000 menjadi 30.000 orang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika terjadi Peristiwa Solo pada 13 September 1948, berupa bentrokan antara pasukan Siliwangi dan pasukan TNI setempat yang telah diinfiltrasi oleh FDR/PKI. Lima hari kemudian, pada 18 September 1948, PKI merebut kota Madiun dan mendirikan pemerintahan komunis lokal dengan Sumarsono sebagai Gubernur Militer. Pemerintah Soekarno-Hatta segera merespons dengan tegas. Dalam pidatonya pada 19 September, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih antara pemerintah RI atau PKI serta memerintahkan TNI untuk merebut kembali Madiun (Mohammad, 1983).

Operasi militer dimulai pada 20 September 1948 di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution. Dalam waktu kurang dari dua minggu, pasukan Divisi Siliwangi berhasil merebut kembali Madiun pada 30 September 1948. Operasi ini kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah lain seperti Ponorogo, Magetan, dan Pacitan hingga pemberontakan berhasil dipadamkan sepenuhnya pada akhir November 1948. Tokoh-tokoh utama pemberontakan seperti Muso tewas dalam pertempuran, sementara Amir Syarifuddin dan Suripno ditangkap dan dieksekusi oleh tentara. Sumarsono melarikan diri dan menyamar sebagai guru selama bertahun-tahun di Sumatera Utara.

Seluruh operasi penumpasan PKI selesai dalam waktu 65 hari, termasuk di daerah-daerah sekitar Surakarta seperti Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus. Setelah pemberontakan dipadamkan, TNI segera melakukan konsolidasi untuk menghadapi ancaman agresi militer Belanda yang datang tak lama kemudian. Pemberontakan PKI di Madiun menjadi salah satu ancaman besar bagi pemerintahan Soekarno-Hatta dan mencatatkan sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju stabilitas politik pasca-kemerdekaan (Susilo, 2017).



## **KESIMPULAN**

PKI secara cerdas mengadopsi propaganda sebagai alat transformasi hegemonik, bukan sekadar agitasi, melalui infiltrasi ke organisasi massa, penggunaan media cetak seperti Sinar Hindia, serta pembentukan serikat buruh dan tani. Tujuannya adalah menantang tatanan feodal dan kapitalis kolonial melalui "pendidikan politik" massa. Meskipun demikian, di satu sisi propaganda ini efektif memicu kesadaran oposisi dan mobilisasi, seperti yang terlihat dalam Pemberontakan 1926–1927, namun di sisi lain peningkatan resistensi ini tidak berhasil ditransformasikan menjadi kekuatan revolusioner yang berkelanjutan karena adanya tekanan kolonial. Masalah substansial PKI terletak pada kegagalan adaptasi ideologis. Meskipun berupaya menyesuaikan Marxisme-Leninisme dengan realitas lokal—misalnya melalui fokus pada isu agraria dan upaya sinkretisme dengan gagasan sosialisme Islam—PKI gagal menemukan sintesis ideologis yang kokoh dan berkelanjutan dengan kultur religius masyarakat Indonesia.

Kegagalan ini menjadi sebab internal yang melemahkan fondasi sosial mereka. Pergeseran strategis pasca-kemerdekaan yang terlihat dalam Pemberontakan Madiun 1948 juga memperlihatkan disorientasi politik: propaganda dialihkan dari anti-kolonial menjadi anti-pemerintahan yang sah, mengakibatkan PKI kehilangan legitimasi moral di tengah sentimen nasionalisme yang kuat, dan pada akhirnya berujung pada kegagalan revolusioner karena kesalahan analisis kelas. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan propaganda PKI bersifat situasional. Propaganda tersebut terbukti sangat efektif dalam membangun resistensi terhadap kolonialisme dan membentuk pola gerakan sosial modern Indonesia, tetapi gagal dalam menginstitutionalisasi perubahan sosial secara permanen. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian ideologi dengan kultur masyarakat dan lemahnya struktur organisasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah PKI, tetapi juga sebagai refleksi penting tentang dinamika



abadi antara ideologi, propaganda, dan perubahan sosial-politik, memberikan relevansi kontemporer dalam memahami bagaimana ketidakpuasan sosial dimanfaatkan untuk membangun legitimasi politik baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ansori. (2025). Islam dan Marxisme: Pergolakan Wacana Pergerakan Di Indonesia. *Studia Islamika*, 32(02), 378. [] Jurnal Ilmiah

Arrasyid, H. (n.d.). *Pemberontakan Madiun 1948*.  
[https://www.academia.edu/35619738/Pemberontakan\\_Madiun\\_1948](https://www.academia.edu/35619738/Pemberontakan_Madiun_1948)

Asmawati. (2021). *Keberadaaan Partai Komunis di Indonesia Tahun 1913-1966* [Skripsi]. Muhammadiyah Mataram.

Batubara, N. I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 2–15. [] Jurnal Ilmiah  
<https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6360>

Brackman, A. C. (1963). *Indonesian Communism*. Frederick A & Praeger. [] Buku

Darsono, R., & Dengah, J. A. (1920a, Oktober 3). SOEARA RA’JAT. *Orgaan Perhimpoean Sociaal Demokraat Hindia (ISDV)*, 02. [] Surat Kabar

Darsono, R., & Dengah, J. A. (1920b, Oktober 4). SOEARA RA’JAT. *Orgaan Perhimpoean Sociaal Demokraat Hindia (ISDV)*, 03. [] Surat Kabar

Hasanah, S. (2020). *Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) Dan Bahanya* (p. 6–7). Dosen Akademi Akuntansi Jayabaya. [] Buku

Hatama, D. A. G. P., Anwar, & Batia, L. (2022). Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 7(1), 58–71. [] Jurnal Ilmiah

Listyawan, I., Khoirulloh, R. W., & Birsyada, M. I. (2024). Kegagalan PKI Membentuk Masyarakat Sosialis Di Indonesia Pada Pemberontakan 1926. *JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA,”* 5(1), 714–720. [] Jurnal Ilmiah



- Masril. (2020). *Pengaruh Komunisme di Indonesia*. Guepedia. [] Buku
- McVey, R. T. (1958). *The Calcutta Conference and the Southeast Asian uprisings*. Cornell University. [] Buku  
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924010721961&seq=3>
- McVey, R. T. (1965). *The Rise of Indonesian Communism*. Cornell University Press. [] Buku
- Mohammad, G. (1983). *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*. Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK). [] Buku
- Muryanti, E. (2020). Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913-1920. *Paramita*, 20(01), 24. [] Jurnal Ilmiah
- Novita, A. (2015). Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913-1925. *Journal Of Indonesian History*, 03(02), 4. [] Jurnal Ilmiah
- Poeze, H. A. (2011). *Madiun 1948: PKI Bergerak*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [] Buku
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, S. N. (1994). *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. PT. Citra Lamtoro Gung Persada Jakarta. [] Buku
- Runalan, & Ginanjar. (2014). Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Jurnal Artefak*, 2(1), 130–135. [] Jurnal Ilmiah
- Sufyan, F. H. (2018). *Menuju Lentera Merah Gerakan Propaganda Komunis Di Serambi Mekah 1923-1949*. Gajah Mada University Press. [] Buku
- Susilo, T. A. (2017). *Ensiklopi Presiden Republik Indonesia: Soekarno*. AR-RUZZ MEDIA. [] Buku
- TNI, P. (2009). *Komunisme di Indonesia Jilid 1 Perkembangan Gerakan Dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*. Pusjarah TNI. [] Buku
- Ubaidillah, H. (2023). *Pemberontakan PKI Madiun 1948*. [] Website  
<https://www.researchgate.net/publication/376046112>
- Vriendenkring. (1986, Januari 11). De eerste marxisten in Indonesie. *De Waarheid*, 12. [] Surat Kabar